

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) Muhammadiyah**

##### **A.1 Profil LPB Muhammadiyah**

Bencana bisa memiliki dampak yang luas pada sebuah Negara, Pemerintah, dan rakyatnya. Karena itu, tanggung jawab utama penanganan bencana harus berada di tangan Negara. Sementara pihak di luar Negara, seperti Organisasi-organisasi non-Pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan Lembaga-lembaga internasional merupakan mitra kerja Negara atau Pemerintah yang berperan serta dalam mempercepat dan menyempurnakan proses penanggulangan bencana di Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan merasa terpanggil untuk ikut berperan serta aktif dalam upaya penanganan bencana

Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan bahwa Pusat Penanggulangan Bencana yang telah dibentuk pada tahun 2007, pada periode 2010-2015 dirubah menjadi Lembaga Penanggulangan Bencana, sehingga kedudukannya menjadi lebih kuat karena menjadi instansi yang langsung berada di bawah koordinasi Pimpinan Muhammadiyah sebagai Unsur

Pembantu Pimpinan (Pasal 20, Anggaran Dasar Muhammadiyah dan SK PP Muhammadiyah 120/KEP/I.0/B/2006 tentang Qoidah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan). Sementara sebutan dalam bahasa Inggris *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) tetap dipertahankan.

Dasar Pembentukannya adalah Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-46 tahun 2010 yang dirilis (tanfidz) dalam Berita Resmi Muhammadiyah No.1/2010-2015. Kutipan keputusan yang terkait langsung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana dalam bentuk jejaring simpul-simpul tanggap darurat, rehabilitasi bencana di lingkungan Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana; peningkatan kapasitas kader, relawan, dan pengelola penanggulangan bencana.
- b. Mengembangkan kesadaran bencana di lingkungan Muhammadiyah, kampanye kesadaran menghadapi bencana di masyarakat, advokasi system penanggulangan bencana, dan usaha-usaha lain dalam program rehabilitasi pasca tanggap darurat yang tersistem dengan program dan prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah.
- c. Meningkatkan keterpaduan dan kesiapan AUMKESOS dan Rumah Sakit dalam penanggulangan bencana, peningkatan kualitas tanggap darurat (response time dan mobilisasi),

peningkatan kualitas manajemen dan pengadaan logistic tanggap darurat, serta advokasi dan rehabilitasi pasca bencana.

Dalam perjalanannya, Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah bergerak berdasarkan :

a) Prinsip Dasar

Terdapat seperangkat prinsip dasar yang dapat diadopsi oleh Lembaga Penanggulangan Bencana untuk penerapan di Muhammadiyah, yaitu;

- Pengurangan Resiko Bencana (PRB) harus menjadi bagian penting dari investasi besar Muhammadiyah di Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan untuk melindungi warga Persyarikatan dan masyarakat secara luas beserta aset-asetnya.
- PRB harus terintegrasi dalam setiap rencana kerja dan program Muhammadiyah karena bencana merusak hasil-hasil pembangunan yang telah susah payah dicapai Muhammadiyah dalam kurun waktu 100 tahun terakhir.
- Muhammadiyah melalui Lembaga Penanggulangan Bencana harus melihat bencana secara *multihazard* sehingga dapat meningkatkan efektivitas.
- Pengembangan kapasitas adalah strategi pokok dalam implementasi PRB oleh Lembaga Penanggulangan

Bencana untuk membangun dan mempertahankan kemampuan organisasi, aktivis, warga persyarikatan dan masyarakat luas dalam mengelola resiko secara baik dan mandiri.

- Implementasi PRB di Muhammadiyah harus terdesentralisasi tanggungjawabnya pada tingkat PWM dan PDM, mengingat wilayah kerja yang sangat luas (33 Propinsi dan 400 Kabupaten/Kota).
- Di tingkat Masyarakat, partisipasi adalah keharusan untuk efektivitas PRB. Lembaga Penanggulangan Bencana harus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan penerapan sehingga dapat memastikan kegiatan yang dilaksanakan merupakan kebutuhan rakyat dan sesuai dengan tingkat kerawanan yang ada.
- Lembaga Penanggulangan Bencana melihat gender sebagai faktor inti dalam PRB karena merupakan prinsip pengaturan utama dalam semua masyarakat, bahkan dalam tingkat akar rumput, wanita dengan peranannya sebagai pengguna dan pengatur sumberdaya lingkungan, penyedia ekonomi, pengurus dan pekerja masyarakat membuatnya sering berada dalam posisi untuk menangani resiko. Lebih dari itu, dengan adanya

‘Aisyiyah dan Nasyiatul ‘Aisyiyah sebagai sayap gerakan perempuan di Muhammadiyah akan memberi nilai lebih.

- Membangun kemitraan dengan swasta dan Lembaga masyarakat berupa asosiasi bersama secara sukarela untuk mencapai tujuan dengan aktivitas kolaboratif.

b) Visi, Misi dan Posisi Strategis

Visi Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah  
“Berkembangnya fungsi dan sistem penanggulangan bencana yang unggul dan berbasis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana serta mampu memulihkan korban bencana secara cepat dan bermartabat”.

Misi Lembaga Penanggulangan Bencana

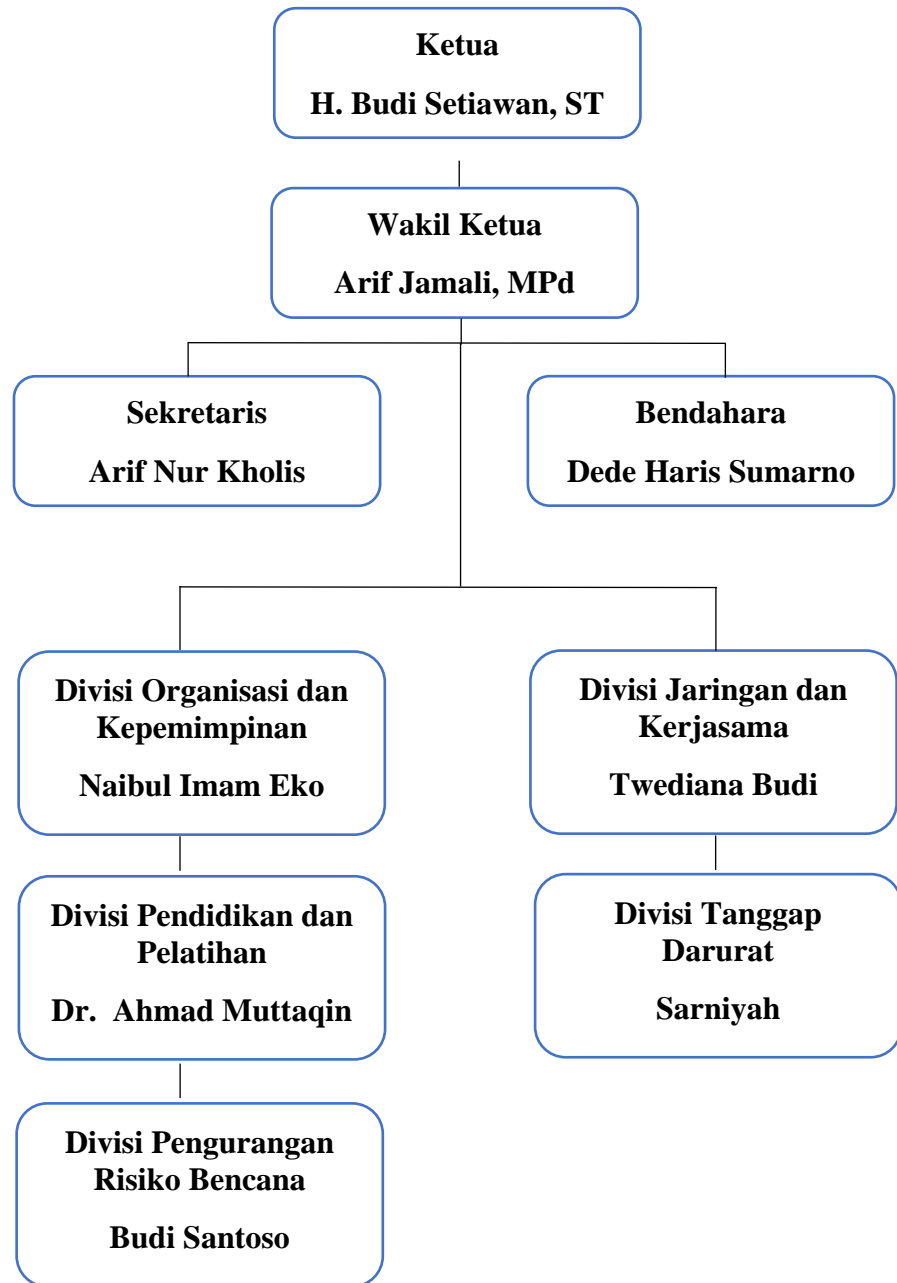
- Meningkatkan dan mengoptimalkan system penanggulangan bencana di Muhammadiyah
- Mengembangkan kesadaran bencana di lingkungan Muhammadiyah
- Memperkuat jaringan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Secara umum, posisi strategis yang dimiliki saat ini adalah;

- Bahwa Lembaga Penanggulangan Bencana adalah gerakan praksis Muhammadiyah *back to basics*, kembali ke basis jati diri, khittah dan bidang gerakannya di bidang da'wah, tarbiyah dan kesejahteraan.
- Melakukan pemberdayaan organisasi dan program Lembaga Penanggulangan Bencana sendiri sebagai bagian integral dari pencerahan kembali gerakan Muhammadiyah berdasar Visi Muhammadiyah 2025 ( “menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang utama serta terciptanya kondisi dan factor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya” )
- Dengan konsolidasi ke dalam, dilaksanakan seiring dengan tantangan dan keikutsertaan Muhammadiyah dalam kegiatan kemanusiaan global.
- Siap menjadi pemain global pada periode muktamar 2015-2020.

## **A.2 Struktur Anggota LPB Muhammadiyah**

Adapun susunan anggota Pimpinan Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.1. Struktur Pengurus LPB Muhammadiyah**

## **B. Program Sekolah Aman Bencana**

Data kementerian Agama menunjukkan dari 208.214 ruang kelas MI dan MTs, sebanyak 13.247 ruang kelas rusak berat dan 51.036 ruang kelas rusak ringan (Perka BNPB No. 4 tahun 2012). Pada 2004, gempa bumi dan tsunami di Aceh, mengakibatkan sedikitnya 750 unit bangunan sekolah rusak dan disapu oleh gelombang. Di Yogyakarta dalam gempa bumi tahun 2006, sebanyak 2.900 sekolah hancur, dan di Padang gempa bumi 2009, mengakibatkan 1,606 kelas di 241 sekolah hancur dan 60 siswa meninggal dunia. Demikian pula gempa bumi dan tsunami terakhir di Mentawai, tercatat tujuh sekolah hancur. Berdasarkan data kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan akhir 2011 sebanyak 194.844 ruang kelas rusak berat di SD/SDLB dan SMP/SMPLB.

Indikasi penguatan kapasitas bangunan sekolah aman adalah aman struktur bangunannya, aman lingkungannya, dan memahami tentang pengetahuan kebencanaan.berlatar belakang keadaan tersebut, sekumpulan anak muda dengan berbagai kompetisinya membuat suatu gerakan sekolah ku aman, dimana semua orang bisa berkontribusidalam pergerakan ini, tanpa memandang suku, bangsa, serta agama.

Melalui bidang Pendidikan (sekolah), pengetahuan akan kesiapsiagaan seseorang dapat ditingkatkan kapasitasnya. Kemudian terbentuklah suatu konsep Pengurangan Resiko



Bencana (PRB) yang dicetuskan oleh tim MDMC. Penanaman dan menginternalisasikan pengetahuan akan kebencanaan dapat ditanamkan sejak dini, Muhammadiyah juga mengambil peran untuk menyiapkan individu yang siap siaga sejak mereka kecil dengan membuat amal usaha sekolah.

Sekolah Aman Bencana adalah sebuah project idealis dari kampanye kesiapsiagaan menghadapi bencana. Disebut idealis karena menurut Ketua LPB PP Muhammadiyah, Ir. Budi Setiawan, program ini ingin melibatkan seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat pusat untuk berbagi peran bersama mewujudkan komunitas yang tangguh dan siap menghadapi bencana.

Pendidikan Pengurangan Resiko Bencana adalah sebuah proses pembelajaran bersama yang bersifat interaktif di tengah masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada. Cakupan Pendidikan penguangan resiko bencana lebih luas daripada Pendidikan formal di sekolah dan universitas. Tersamuk di dalamnya adalah pengakuan dan penggunaan kearifan tradisional dan pengetahuan local bagi perlindungan terhadap bencana alam. Pada Program SAB ini, LPB PP Muhammadiyah bersama LAZIMU berusaha menciptakan sebuah sinergi antara pengetahuan modern kesiagaan bencana dengan kearifan local yang tumbuh di daerah

sekolah yang ditetapkan sebagai pilot project Sekolah Aman Bencana ini.

SD Muhammadiyah 10 Pagak di Kabupaten Malang dan MI Muhammadiyah Kalibening di Kabupaten Magelang, di tentukan sebagai langkah awal pilot project Sekolah SIaga Bencana. Pemilihan kedua sekolah tersebut dari awal sudah menerapkan prinsip sekolah siaga bencana, yakni adanya keterlibatan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, penentuan sekolah dilakukan oleh LPB dan Majelis Dikdasmen di daerah karena merekalah yang paling mengerti kondisi, kerentanan, dan kapasitas yang dimiliki sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya.

Kedua sekolah SAB kali ini mewakili jenis kerentanan yang berbeda. SD Muhammadiyah 10 Pagak terletak di persimpangan aliran sungai yang deras dan sudah beberapa kali di terjang banjir. Yang satunya, MI Muhammadiyah Kalibening terletak di kaki gunung Merapi yang retan terhadap efek letusan, seperti awan panas dan lahar dingin. Dengan jenis kerentanan yang berbeda, masing-masing sekolah diharapkan mampu menjadi contoh pembelajaran kesiapsiagaan yang berbeda pula. Dari kedua sekolah tersebut semoga upaya penanggulangan bencana dapat lebih membuahkan hasil yang lebih baik dengan berkurangnya setiap resiko dan kerugian akibat sebuah bencana.

### **A.3.3 Perkembangan Program**

#### **C. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dari penelitian ini maka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan sekolah aman bencana oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca, berikut data penelitian dan hasilnya:

penelitian pertama yang dilakukan oleh Farichatun Nisa' dalam jurnal JKMP dengan judul *Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang* Vol. 2, No. 2, September 2014. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan paling menonjol yang dilakukan adalah pada saat *response* bencana. Hal tersebut dilakukan melalui tindakan sebelum terjadinya bencana melalui sosialisasi dari BMKG dan tindakan sesudah terjadinya bencana melalui pengiriman tim reaksi cepat. Kedua tindakan tersebut memiliki keterkaitan yang sangat penting dalam penanggulangan bencana untuk meminimalisir adanya korban. Sedangkan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat berupa partisipasi dalam bentuk partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda dan keterampilan dan kemahiran, serta partisipasi sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi yang paling menonjol yang dilakukan masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah partisipasi tenaga dan partisipasi sosial.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Shanti Dwi Kartika dalam jurnal Kajian dengan judul *Politik Hukum Penanggulangan Bencana*, Vol. 20 No. 4 Desember 2015 mengatakan bahwa unsur-unsur tahap tanggap darurat sebagai pra-bencana perlu dipersiapkan secara terpadu dengan penekanan pada unsur pencegahan dan kesiapsiagaan, yang didasarkan pada hasil analisis terhadap keempat *trigger* bencana yaitu ancaman bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), kapasitas (*capacity*), dan resiko bencana (*disaster risk*). Oleh Karena itu, *legal policy* terhadap penanggulangan bencana dapat dinilai dan dievaluasi dari kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan bencana, salah satunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Astuti dan Sudaryono di lokasi rawan bencana yaitu untuk bencana gempa bumi adalah masyarakat di Bantul, bencana banjir adalah masyarakat di sekitar sungai Bengawan Solo dan bencana gunung meletus adalah masyarakat di sekitar Sleman yang tinggal di sekitar gunung merapi yang dimuat dalam jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, Vol. 1 No. 1 tahun 2010 yang berjudul *Peran Sekolah Dalam Pembelajaran Mitigasi Bencana* memperoleh hasil pada data kuesioner terbuka yang dianalisis terhadap jawaban responden ke dalam empat tahapan yakni tahap Obyektif, tahap Reflektif, tahap Intepretatif dan tahap Decision. Tahap kesadaran Obyektif (O) kecenderungan jawaban siswa pada kondisi daerah gempa yakni: mengungsi sebagai mekanisme

penyelamatan gempa (55,66%); mendorong saling tolong menolong (90%) dan berdoa (95%); kesadaran membuat bangunan tahan gempa 40% dan belum sadar 60%, kehilangan teman (63%) dan banyak yang kehilangan pekerjaan (53%). Tahap kesadaran Reflektif (R) ada kecenderungan yang menarik untuk dicermati karena ada jawaban yang sangat variatif antar aspek-aspek yang terkait dengan tahap reflektif sebagian berikut: menjadi sedih karena banyak korban (85%) dan harta benda hilang (87%); membutuhkan pengetahuan tentang antisipasi bencana gempa (73%); was-was banyak anak-anak terserang penyakit (90%). Tahap kesadaran Interpretatif (I) kecenderungan jawaban siswa sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat (53%) mau belajar (76%) menjadi lebih mandiri (73%), sebagai modal untuk membangun resiliensi; menghadapi bencana perlu kepasrahan (85%), Karena semua sebagai ujud kebesaran Allah (97%) membangun kewaspadaan siaga (87%). Tahap kesadaran Pengambilan Keputusan menjadi aspek penting dalam mitigasi bencana. Karena tahap ini dijadikan dasar untuk melakukan aksi saat belum dan sesudah bencana: perlu pendidikan bencana (96%) warga perlu kerja bakti untuk membangun kebersamaan dan gotong royong (96%) membuat bangunan dan fasilitas tahan gempa (84%) melakukan proses evakuasi (93%) perbaikan bangunan sekolah dan fasilitas umum (95%) jika ada tanda-tanda bencana diputuskan mengungsi (84%) mengikuti petunjuk pemerintah (65%).

- Mungkin bisa ditambahin sejarah perkembangan sekolah aman bencana di Indonesia